



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG SETIJONO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI V**
3. NHK : **108913**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.095.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 589 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 505.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA BYSON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, ALL NEW ERTIGA GX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI Z250 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 41.000.000
5. MOBIL, BRIO SATYA SATYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
6. MOTOR, VESPA LX LX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
7. LAINNYA, POLYGON STRATTOS 5 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



8. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.128.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 44.088.321

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.716.716.321

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.716.716.321

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.